

PERANAN AUSTRALIA DALAM PEMBANGUNAN ACEH PASCA BENCANA TSUNAMI MELALUI KERANGKA KERJASAMA AIPRD (AUSTRALIA-INDONESIA PARTNERSHIP FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT) PERIODE 2005-2009

A.A. Alit Maradi Wiswa Dhamana, I Made Anom Wiranata, A.A. Ayu Intan Parameswari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: Alitmaradi@gmail.com, anomwiranata@gmail.com, Prameswari.Intan@gmail.com

ABSTRAK

Nowadays, development is one of the important aspects and have been an international agenda. In 2004, Indonesia was hit by tsunami that caused damage to various aspects of life in Aceh, it certainly would hamper development in Indonesia. This disaster attracted sympathy from other countries to assist Indonesia in reconstruction of Aceh post tsunami. One of them is Australia with its development agency AusAID (Australian Agency for International Development). AusAID as the Australian government development agencies that play roles in international development. AusAID as the Australian development agency has provided ODA (Official Development Assistance) bilaterally to Indonesia. The aid later formed a partnership AIPRD (Australia-Indonesia Partnership for Reconstruction and Development) aimed at the develop and reconstruction of Aceh after the disaster. This aid distributed to develop all sectors such as education, health, governance, livelihoods, housing and infrastructure. This study aims to describe the roles of Australia in the process of development and reconstruction of Aceh post tsunami through AIPRD program in the year 2005-2009.

Keywords : Roles, development, development agency, foreign aid, AusAID, Aceh

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hubungan bilateral antara Australia dengan Indonesia mengalami pasang surut dari tahun 1990 hingga 2013 (Najhib, 2014). Akan tetapi, dalam perkembangannya hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia mengalami peningkatan pada bidang kemanusiaan. Salah satu contohnya adalah ketika peristiwa tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darrusalam (NAD). Bencana tsunami tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 dan merupakan gelombang terparah yang pernah menghantam Indonesia dengan korban jiwa mencapai 500.000 orang.

Akibat bencana tersebut Indonesia banyak kehilangan sarana dan fasilitas umum seperti fasilitas umum jalan, jembatan, pelabuhan dan rumah sakit (AIPRD report, 2006). Indonesia berada pada peringkat pertama dengan kerusakan 167.736 disusul Srilanka dengan kerusakan 35.322 dan India pada peringkat ketiga dengan kerusakan 18.045

(Srivichai, Supharatid & Imamura, 2007). Hal tersebut disebabkan karena letak episentrum gempa yang terlihat pada gambar sangat dekat dengan Indonesia.



Gambar 1. Pusat gempa dan dampak tsunami di Samudra Hindia.

Pasca bencana, pemerintah Indonesia fokus untuk membangun segala kerusakan infrastruktur. Pemerintah Indonesia mulai melakukan pembangunan di Aceh pada berbagai bidang kehidupan manusia seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur perumahan, dan pemerintahan. Peristiwa tersebut juga membuat berbagai negara bersimpati untuk memberikan bantuan dalam memulihkan keadaan di Aceh. Salah satu negara yang berperan dalam pembangunan Aceh adalah Australia.

Kerjasama Australia-Indonesia dalam bidang pembangunan telah terjalin sejak tahun 1950-an yang ketika itu didanai melalui Colombo Plan (BAPPENAS, 2007). Australia juga merupakan salah satu negara pendonor yang tercatat pada *Paris Declaration on Aid effectiveness* serta tergabung di dalam negara-negara OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*).

Peran serta Australia dalam pembangunan di Aceh pasca tsunami dilakukan melalui agensi pembangunan Australia yang bernama AusAID (*Australian Agency for International Development*) dengan didasarkan pada strategi pembangunan negara Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi fokus AusAID yaitu dalam bidang pembangunan infrastruktur yang hancur akibat tsunami di Aceh. Melalui program AIPRD (*Australia-Indonesia Partnership for Reconstruction and Development*) pemerintah Australia

bekerjasama dengan pemerintah Indonesia (*government to government*) dalam proses pembangunan dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami.

Bantuan finansial dalam program AIPRD disalurkan kepada berbagai lembaga yang memiliki peranan dalam rekonstruksi di Aceh. Bantuan finansial ini sejumlah 1 miliar dolar yang terbagi menjadi dua bentuk yaitu hibah (*grant aid*) senilai 500 juta dolar dan 500 juta dolar berupa pinjaman lunak (*loan aid*) jangka panjang dan perjanjian ini memiliki jenjang waktu selama lima tahun.

Program kerjasama tersebut akan menangani berbagai sektor penting seperti pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam pelaksanaannya Australia akan selalu mengacu pada prosedur-prosedur panduan AIPRD seperti membangun kemitraan yang efektif dan melaksanakan program dengan keunggulan-keunggulan.

Dalam pelaksanaannya Australia banyak menemukan tantangan dalam proses pembangunan. Salah satunya konflik berkepanjangan yang membuat lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Selain itu pula, tidak terdapat proyek-proyek pembangunan baik dari pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ataupun lembaga bantuan asing sebelum terjadinya bencana tsunami yang kemudian membuat kedua pemerintah harus memulai bekerja dari awal "titik nol". Kerusakan Infrastruktur akibat tsunami seperti jalan, juga menjadi salah satu hambatan dalam menjalankan program-program pembangunan (AIPRD report, 2008).

1.2 Kerangka Konseptual

1. Konsep Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri menurut Perwita & Yani, (2005) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri untuk membantu negara-negara yang memerlukan bantuan. Seperti halnya Australia yang bersimpati untuk memberikan bantuannya kepada Indonesia pasca bencana tsunami. Bantuan luar negeri (*foreign aid*) sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan negara, masyarakat (penduduk), atau lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya yang berada pada suatu negara tertentu ataupun pasar tertentu di luar negeri, memberikan bantuan

berupa pinjaman, hibah atau penanaman modal mereka kepada pihak tertentu di negara lainnya (Ikbar, 2006, hal. 187-188).

Pada penelitian ini bantuan luar negeri yang diberikan oleh Australia melalui AusAID bersifat Hibah (*grant*) dan pinjaman lunak (*loan aid*) yang merupakan salah satu sifat dari bantuan luar negeri. Hibah itu sendiri merupakan pemberian yang terdiri dari sumbangan berupa uang atau barang yang biasanya ditunjukkan untuk aktifitas sosial seperti bencana alam (Ikbar, 2006). Sedangkan *loan aid* merupakan bantuan pinjaman yang diberikan oleh negara donor dengan syarat tertentu.

Dalam proses penyaluran bantuan luar negeri dapat dibagi menjadi dua yakni bilateral dan multilateral. ODA (*Official Development Assistance*) yang diberikan oleh Australia kepada Indonesia melalui AusAID tergolong bantuan yang disalurkan secara bilateral sebab bantuan bilateral akan langsung diberikan kepada negara berkembang.

2. Konsep Agensi Pembangunan

Pada proses pemberian bantuan luar negeri terdapat beberapa aktor seperti negara dan badan-badan milik negara atau agensi pembangunan. Aktor yang terlibat dalam bantuan pembangunan dapat dikelompokkan berdasarkan perannya. Peranan dari aktor tersebut yakni donor sebagai penyedia dana, pelaksana yang menyediakan pelayanan jasa dan penerima yang menerima manfaat dari dana dan jasa. Selain itu, dari segi status aktor-aktor tersebut juga dapat dibedakan yakni negara berdaulat dan agensi-agensi yang berasosiasi dengan negara, dan organisasi non-pemerintah (Tisch dan Wallace, 1994).

Peranan Australia dalam pembangunan di Aceh pasca tsunami merupakan bantuan resmi yang berasal dari negara (*state*). Dalam kasus ini pemerintah Australia menyalurkan bantuannya melalui AusAID sebagai agensi pemerintah Australia yang melaksanakan bantuan resmi bilateral. Indonesia sebagai resipien yang menerima manfaat dari bantuan yang diberikan oleh AusAID.

3. Konsep Pembangunan Pasca Bencana

Pembangunan memiliki pengertian yakni menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang (Richard & Elaine, 2009). Pembangunan juga sering berkaitan dengan istilah pertumbuhan dari berbagai sektor. Terkait dengan peristiwa yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 yakni gempa dan tsunami yang merupakan salah satu bencana alam terbesar yang membuat seluruh negara di dunia menunjukkan kepedulian mereka dalam proses pembangunan infrastruktur di Aceh. Salah satu dari negara tersebut adalah Australia.

Dilihat dari kerusakan pada bidang infrastruktur sosial yang sangat parah, maka tindakan rekonstruksi tidak bisa lepas dari penyelesaian masalah tersebut. Rekonstruksi sendiri memiliki pengertian sebagai tindakan perbaikan dan pembangunan kembali prasarana dan fasilitas umum (Sulistianto, 2013). Pada

kasus ini Australia akan melakukan tindakan pembangunan yang mengarah pada kegiatan rekonstruksi dengan melihat sasaran utama yakni pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana (BNPB, 2007).

4. Konsep Peranan

Peranan itu sendiri memiliki definisi salah satunya menurut Mochtar Mas'ood menyatakan bahwa peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan sesuai dengan peran yang diharapkan dan peran yang dijalankan (Perwita & Yani, 2006, hal. 30). Pada konsep peranan ini agensi pembangunan melakukan tindakan terkait fungsi yang mereka jalani baik untuk meningkatkan perekonomian di suatu daerah, atau membantu dalam menentukan arah pembangunan.

5. Teori *Development Intervention*

Menurut Tiina Kontinen (2004), kata intervensi dalam artian luas sering dianggap sebagai hal yang lebih baik untuk dihindari karena dianggap cenderung berkaitan dengan tindakan penyelesaian konflik, kekerasan, maupun tindakan militer dan lainnya. Namun pada sisi pembangunan kata intervensi dikaitkan dengan upaya pembangunan, kerjasama, kemitraan berkelanjutan. Hal ini karena aktivitas pembangunan lebih menekankan pada keterlibatan mereka dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan kerjasama. Maka dari itu intervensi diperlukan dalam bidang pembangunan suatu negara. sesuai dengan asumsi dari Juhani Koponen bahwa pembangunan di negara berkembang tidak mungkin dapat direalisasikan tanpa adanya intervensi dari pihak asing.

Teori ini memiliki relevansi pada penelitian ini yakni untuk memahami fenomena tsunami Aceh. Adanya intervensi dari Australia dalam pembangunan Aceh pasca tsunami melalui kerangka kerjasama AIPRD dilatar belakangi

oleh kemampuan yang kurang dari pemerintah Indonesia dalam kegiatan pembangunan.

6. Teori Peranan *Development Agency*

Peranan dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang memiliki bentuk struktur lembaga untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disetujui bersama. Apabila struktur tersebut menjalankan fungsi-fungsinya, maka organisasi itu menjalankan peranan tertentu (Perwita dan Yani, 2006 : 30).

Peranan pertama agensi pembangunan menurut OECD adalah fungsi untuk melakukan peranan ekonomi (*economic roles*). Tindakan tersebut mengacu pada upaya untuk membangun pasar di wilayah kerja mereka seperti melibatkan intermediasi dengan investasi, aset, infrastruktur, tanah, properti, keuangan, perencanaan, dan pemasaran. Peranan kedua yakni kepemimpinan (*leadership roles*) pada dasarnya agensi pembangunan memainkan peranan kunci dalam mendukung rencana jangka panjang dan visi pembangunan disebuah wilayah seperti memprioritaskan kepentingan-kepentingan negara resipien.

Ketiga peranan tata kelola dan koordinasi (*governance and co-ordination roles*), agensi pembangunan akan membantu memfasilitasi kegiatan dalam hal koordinasi untuk mencapai tujuan strategi pembangunan dan mengatasi kesenjangan yang ada antara pihak swasta dan publik. Terakhir dari OECD peranan pelaksanaan (*implementation roles*) agensi pembangunan membantu penyusunan tim yang berdedikasi serta mampu fokus dalam mencapai target-target dari strategi pembangunan. Selain keempat peranan tersebut OECD juga mengatakan bahwa pemerintahan di negara berkembang biasanya memiliki kapasitas yang kurang dalam membangun infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan di negara mereka. Oleh karena itu, agensi pembangunan sering juga dapat berperan sebagai fasilitator atau sebagai katalis dalam mempercepat pertumbuhan disuatu negara dengan menyediakan infrastruktur (OECD, 2009).

Terdapat pula peranan lainnya yang dikatakan oleh Tom Fox dan Dave Prescott (2004). Agensi pembangunan akan mampu dan sering menggandeng sebuah perusahaan dalam sebuah kegiatan pembangunan di sebuah

wilayah. Fungsi kedua adalah membangun kapasitas pemerintah dan kerangka kerja pemerintahan umum. Fungsi agensi pembangunan ini seperti melakukan sebuah tindakan untuk memperkuat peraturan atau hukum di negara mereka bekerja sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang bertanggung jawab. Tindakan tersebut seperti mendukung kapasitas para pembuat peraturan dengan memberikan pelatihan.

Fungsi ketiga yakni membangun kapasitas sektor swasta lokal, tenaga kerja dan organisasi-organisasi masyarakat sipil termasuk sebagai perantara (*intermediaries*). Agensi pembangunan dapat mendukung lembaga-lembaga tertentu dengan tujuan untuk menciptakan kondisi usaha yang baik. Lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi perantara, penasehat, advokat ataupun kelompok penekan sehingga tanggung jawab perusahaan swasta dapat relevan dengan konteks lokal. Fungsi keempat, agensi pembangunan juga memiliki peranan dalam meningkatkan kemampuan pasar lokal. Dengan melakukan kerjasama dengan UKM (usaha kecil menengah) dan LSM (lembaga swadaya masyarakat) agensi pembangunan dapat meningkatkan kapasitas pengusaha lokal untuk dapat bersaing dan bertanggung jawab. Fungsi kelima adalah dalam memelihara dan meningkatkan pertumbuhan di negara berkembang, agensi pembangunan dapat memberikan perannya dalam berinvestasi pada kapasitas manusia dan kepemimpinan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian pertama yang penulis gunakan adalah penelitian dari Yasuyuki Sawada pada tahun 2011 yang berjudul "*Economics of Official Development Assistance : Views From Japan and East Asia*". Tulisan Sawada (2011) membahas tentang bantuan pembangunan atau ODA (*Official Development Assistance*) yang mampu meningkatkan tujuan-tujuan pertumbuhan disuatu negara baik tidak ataupun terkena bencana. Hal tersebut disebabkan karena ODA memiliki peranan sebagai instrumen penting bagi pembangunan pasca bencana di negara penerima (*resipient*). Adapun perbedaan penelitian ini adalah terletak pada pendonor yang mana Sawada melihat negara Jepang sedangkan penulis di Australia. Sawada juga lebih melihat pada mekanisme transfer ODA yang lebih efektif dalam rangka mengatasi

bencana sedangkan penulis melihat peranan dari aktor pemberi bantuan dalam mengatasi bencana. Maka tulisan Sawada relevan dengan tema tulisan penulis yaitu membahas bantuan pembangunan dari negara lain dalam penanggulangan pasca bencana.

Adapun tulisan kedua yang penulis gunakan adalah tulisan dari Monkorn Srivichai, Seree Supharatid dan Fumihiko Imamura pada tahun 2007 yang berjudul "*Recovery Process in Thailand after the 2004 Indian Ocean Tsunami*". Penelitian mereka menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh agensi pembangunan di Thailand pasca bencana tsunami. Agensi pembangunan tersebut seperti USAID dan JICA. Pada peristiwa tersebut agensi pembangunan melakukan pembangunan dalam hal pencegahan bencana tsunami. Tindakan tersebut seperti pembangunan menara sirine dan teknologi tinggi lainnya dalam mengantisipasi tsunami. Maka terlihat perbedaan penelitian tersebut dimana negara penerima bantuan pembangunan yang berbeda dan juga donor yang berbeda.

Tulisan ketiga yang penulis gunakan adalah tulisan dari Sue Kenny pada tahun 2007 yang berjudul "*Reconstruction in Aceh: Building whose Capacity?*". Tulisan ini menekankan pada dampak dari bantuan yang diberikan oleh berbagai donor yang membangun Aceh pasca bencana. Dampak tersebut seperti dampak positif dan negatif dari pembangunan tersebut. Perbedaannya adalah tulisan ini adalah pihak donor yang dilihat dari keseluruhan donor yang ada. Penelitian ini juga lebih bersifat mengkritisi dari adanya bantuan pembangunan. Berbeda dengan penelitian penulis yang ingin melihat peranan Australia dalam pembangunan di Aceh pasca tsunami.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan peranan Australia dalam pembangunan Aceh pasca bencana tsunami melalui kerangka kerjasama AIPRD periode 2005-2009. Lokasi penelitian adalah cabang AusAID di Indonesia. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder baik dari dokumen AusAID dan pemerintah Indonesia serta Australia, selain itu data yang terkait dengan studi ini, tesis, skripsi, buku, jurnal, dan data lainnya di berbagai *website* yang berhubungan dengan kegiatan

AusAID dalam peranan untuk pembangunan di Aceh (Noor Juliansyah, 2011).

Unit analisis dari penelitian ini adalah AusAID sebagai agensi pembangunan pemerintah Australia yang berfungsi sebagai aktor pelaksana yang bertanggung jawab atas bantuan luar negeri Australia. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang data-datanya berupa data sekunder yang berasal dari dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasca bencana tsunami di Aceh, pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan dalam pembangunan kembali seluruh kerusakan infrastruktur masyarakat. Dapat diketahui kerusakan yang ditimbulkan oleh tsunami pada bidang infrastruktur sosial sangatlah banyak yakni sebesar 16.189 bangunan (*World Bank*, 2005). Selain kerugian pada sektor fisik terdapat pula kerugian pada sektor tenaga kerja atau SDM (sumber daya manusia). Hal itu disebabkan oleh kematian dari warga Aceh yang luar biasa banyak sekitar 167.000 jiwa (AIPRD, 2008). Dapat diketahui dari kalkulasi kerugian yang diderita oleh Indonesia yakni mencapai Rp 41,4 triliun atau \$ 4,5 miliar (McKeon, 2004). Selain Indonesia terdapat pula negara lain yang terdampak oleh tsunami di Samudera Hindia tersebut. Negara itu seperti Thailand, India, dan Srilanka, namun kerugian terparah diderita oleh Indonesia.

Adapun wilayah-wilayah Aceh yang mengalami dampak yang cukup parah dari tsunami yakni wilayah kabupaten yang berhadapan langsung dengan perairan laut. Kabupaten tersebut seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Simeulue yang berhadapan langsung dengan samudera Hindia. Perairan Laut Andaman yang berada disebelah Utara yang berhadapan langsung dengan Kota Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang juga sama memiliki tingkat kerawanan. Selain itu perairan Selat Malaka disebelah Utara dan Timur yang berhadapan langsung dengan Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang juga merupakan wilayah-wilayah rawan (RPJP Aceh, 2005).

Aceh memiliki sejarah geologis yang sangat sering mengalami bencana gempa bumi dan tsunami. Peristiwa tersebut dikarenakan provinsi

Aceh berada pada lempeng tektonik antara lempengan *Indo-Australia* di Selatan dengan lempengan *Eurasia* di Sumatera dan Jawa yang merupakan lempeng aktif. Pusat gempa yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 terletak sekitar 150 kilometer di Selatan Kota Meulaboh. Jarak yang tergolong dekat itu membuat gelombang tsunami besar menghantam Aceh.

Sebelum terjadinya bencana tsunami, provinsi Aceh juga merupakan provinsi termiskin pada peringkat ke tiga di Indonesia dengan rata-rata kemiskinan 28,4% dari 16,7 % rata-rata kemiskinan di seluruh Indonesia. Namun, pasca bencana tingkat kemiskinan di Aceh bertambah parah yakni 32,6 % (*World Bank*, 2008). Peningkatan kemiskinan itu terjadi disebabkan karena kerusakan infrastruktur sosial yang cukup tinggi sehingga membuat masyarakat Aceh tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi dan lainnya. Hal ini menandakan bahwa kurangnya kemampuan pemerintah Indonesia dalam membangun provinsinya sendiri terkait dana dan sumber daya manusia sangatlah terlihat. Maka dari itu pemerintah Indonesia menerima beberapa bantuan luar negeri dari beberapa negara dan organisasi internasional. Salah satu negara yang memberikan bantuan kepada Indonesia yakni Australia.

Pasca bencana tsunami di Aceh, berselang beberapa Minggu Australia memberikan banyak bantuannya. Pada awalnya bantuan yang diberikan oleh Australia berbentuk bantuan darurat. Australia menanggapi serius permasalahan ini dengan berkomitmen besar untuk membantu pemerintah Indonesia dalam membangun negaranya bukan hanya di Aceh melainkan seluruh Indonesia. Komitmen itu ditunjukkan dengan memberikan bantuan luar negeri (ODA) yang disalurkan melalui cara bilateral.

Pada awal tahun 2005 Perdana Menteri John Howard bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan bantuan luar negeri dari Australia. Pertemuan ini menghasilkan kemitraan yang bernama AIPRD (Australia-Indonesia Partnership for Reconstruction and Development). Kerangka kemitraan AIPRD ini nantinya akan dikoordinir oleh kedua negara dalam pelaksanaannya. Kemitraan ini dilakukan sebagai bentuk kerjasama bilateral untuk mengelola kegiatan pembangunan di Indonesia khususnya Aceh. Kemitraan AIPRD dilaksanakan selama lima

tahun atau jangka menengah senilai satu miliar dolar Australia.

Adapun aktor pelaksana dalam kemitraan AIPRD ini adalah AusAID. AusAID merupakan agensi pembangunan nasional Australia yang bertanggung jawab atas pengelolaan bantuan luar negeri dari Australia. Pada pelaksanaannya, kemitraan AIPRD akan dilaksanakan dengan berbagai pihak atau tender yang berada dibawah kontrak Australia. Selain itu pada kemitraan ini hanya tender dari negara Australia, Indonesia dan Selandia Baru sajalah yang dapat bekerja (AIPRD Report, 2008). Australia juga akan bekerjasama dengan beberapa departemen untuk memperlancar kegiatan pembangunan. Departemen tersebut seperti Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT), Kantor Kabinet dan Perdana Menteri (PM&C), Departemen Anggaran, Departemen Pertahanan, Polisi Federal Australia, Departemen Transportasi dan Layanan Regional, Departemen Imigrasi (DIMIA), Lembaga Karantina dan Inspeksi Australia (AQIS) dan Departemen Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Pelatihan (DEST) (BAPPENAS, 2007).

Adapun beberapa permasalahan yang muncul dari kemitraan ini seperti terkait sifat dari aliran modal bantuan luar negeri. Sempat terdapat penolakan dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Indonesia terkait setengah bantuan luar negeri Australia yang bersifat *loan aid* (pinjaman lunak). Namun Bappenas sebagai koordinator bantuan luar negeri dapat menjelaskan bahwa syarat yang diberikan oleh Australia sangatlah ringan. Selain itu juga jika dilihat dari kerusakan yang diderita oleh Indonesia yang cukup besar, maka bantuan luar negeri sangatlah berguna untuk mempercepat pembangunan di wilayah bencana. Jika ditinjau dari pengalaman negara Jepang dan juga *International Financial Institution* (IFI) bantuan luar negeri sangatlah berguna bagi negara berkembang dan negara miskin untuk investasi infrastruktur jangka panjang ketika terjadi sebuah bencana (AIPRD Report, 2008).

Pasca tsunami kegiatan pembangunan melalui kerangka kerjasama AIPRD sudah dilakukan oleh kedua negara di Indonesia. Australia memberikan banyak bantuan kepada Indonesia yang dituangkan pada berbagai program. Program-program tersebut seperti Dana Kemitraan Pemerintah (GPF) senilai A\$ 50 juta yang bertujuan untuk memperbaiki pertumbuhan dan manajemen ekonomi. Selain

itu program *Technical Assistance Management Facility* senilai A\$ 26 juta yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli teknis untuk membantu pengembangan dan pelaksanaan kebijakan di beberapa lembaga ekonomi utama pemerintah Indonesia. Program ini akan dilaksanakan diseluruh provinsi di Indonesia termasuk provinsi Aceh.

Dalam mendukung transisi ke era demokrasi Australia memberikan dana senilai A\$ 10 juta yang bertujuan untuk menata kembali layanan pemerintah daerah Aceh. Program lainnya adalah *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS)* senilai A\$ 19 juta. Program ini menitik beratkan pada hubungan yang kuat antara masyarakat dengan lembaga pemerintah dan lembaga jasa layanan lainnya. Program lainnya yaitu *Australia Legal Development Facility (IALDF)* senilai A\$ 22 juta. Kegiatan yang dilakukan seperti melakukan peningkatan kapasitas lembaga lokal yang ditunjukkan untuk mendukung transisi ke era demokrasi di Indonesia. Dengan melakukan tindakan dimana Australia bekerjasama dengan lembaga pemerintah Indonesia, lembaga hukum, dan pengadilan serta Ormas (organisasi masyarakat) yang bergerak dibidang hukum dan HAM dalam mendukung agenda reformasi hukum dan HAM yang senantiasa berkembang. Selain itu bantuan lima tahun senilai A\$ 6,5 juta juga dilakukan untuk membiayai koalisi dengan NGOs dalam melaksanakan pengawasan pemilu provinsi, kabupaten dan kota madya di seluruh Indonesia.

Australia juga memiliki tema pencapaian lainnya yakni meningkatkan keamanan dan stabilitas manusia. Adapun beberapa program di dalamnya adalah seperti bantuan senilai A\$ 10 juta untuk mengembangkan sistem pengelolaan dan tanggap bencana alam Indonesia, termasuk meningkatkan kapasitas tanggap bencana organisasi lokal, dan kerjasama erat dengan badan pengelolaan dan koordinasi bencana Indonesia dan Australia. Selanjutnya program rehabilitasi Aceh senilai A\$ 151 juta yang berfokus pada bidang kesehatan, pendidikan, tata pemerintahan dan pemulihan kembali prasarana penting milik umum.

Adapun tema pencapaian lainnya adalah meningkatkan akses dan mutu jasa layanan umum. Program ini senilai A\$ 11 juta untuk memberikan layanan persediaan air bersih dan sanitasi yang aman, memadai, murah,

berkesinambungan dan dapat diakses secara mudah untuk komunitas berpenghasilan rendah di beberapa provinsi. Selain itu Program pendidikan dasar senilai A\$ 300 juta yang akan membantu membangun dan merehabilitasi fasilitas sekolah di daerah miskin dengan layanan dibawah standar, dan meningkatkan mutu pendidikan melalui pelatihan guru dan perbaikan manajemen pendidikan.

Terdapat beberapa sektor-sektor penting yang digunakan oleh penulis sebagai indikator penting untuk mempermudah melihat peranan yang dimainkan oleh agensi pembangunan. Sektor-sektor tersebut seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan perumahan, tata pemerintahan dan mata pencaharian. Dengan melihat sektor tersebut maka penulis akan menganalisis dan interpretasikan peranan yang dimainkan oleh Australia dalam pembangunan Aceh pasca bencana tsunami melalui kerangka kerjasama AIPRD.

Pada kemitraan ini peranan umumnya yang terdapat pada Australia yakni sebagai peranan kepemimpinan (*leadership roles*). Peranan ini terlihat dari diberikannya tanggung jawab penuh atas kemitraan AIPRD oleh departemen luar negeri dan perdagangan kepada AusAID untuk menyusun strategi dan perancangan pembangunan di Aceh. Peranan kepemimpinan juga didukung dengan peranan pelaksanaan (*implementation roles*) dimana AusAID memiliki kemampuan khusus dalam melihat dan melaksanakan suatu program dengan penyusunan tim yang berdedikasi serta mampu fokus dalam mencapai target-target dari strategi pembangunan. Disini kemampuan dari agensi pembangunan akan terlihat baik dalam keterampilan manajemen dan keuangan serta di bidang jasa seperti kemampuan untuk merancang strategi dan menggunakan alat-alat baru dengan cepat (OECD, 2009).

Pada sektor kesehatan, Australia banyak melakukan pembangunan kembali atau rekonstruksi rumah sakit dan lain sebagainya. Pembangunan tersebut di akibatkan karena tingkat kerusakan fasilitas umum di bidang kesehatan sangat besar. Selain itu sumber daya manusia dibidang kesehatan sekitar 10% dinyatakan meninggal. Melihat berbagai tantangan tersebut AusAID sebagai aktor pelaksana dalam pembangunan di Aceh pada kemitraan AIPRD ini merancang strategi yang efektif dalam pembangunan berdasarkan isu-isu yang ada di lapangan. Maka dari itu, adapun peranan yang dimainkan oleh Australia pada sektor kesehatan yakni peranan sebagai

fasilitator. Peranan ini dilatar belakangi oleh kurangnya kemampuan pemerintah Indonesia dalam melakukan pembangunan infrastruktur di wilayahnya sendiri. Kekurangan itulah yang dilihat oleh agensi pembangunan Australia untuk membangun fasilitas penting di Aceh seperti halnya pada infrastruktur kesehatan.

Peranan ini dibuktikan dengan dibangunnya infrastuktur fisik Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Zainoel Abidin, dan juga membangun empat klinik kesehatan, serta merekonstruksi akademi kebidanan. Dalam meningkatkan kemampuan tenaga kerja di sektor kesehatan maka Australia membangun fasilitas pelatihan kesehatan bagi para mahasiswa yang nantinya dapat ditempatkan pada rumah sakit dan puskesmas. Selain itu Australia juga merenovasi laboratorium lingkungan dan mikrobiologi, laboratorium gizi. Adapula kegiatan pembangunan lainnya yakni membangun gudang farmasi dan membangun gedung administrasi utama di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Banda Aceh.

Adapun peranan lainnya yang dilakukan Australia pada sektor ini seperti Peranan sebagai pengembangan kapasitas (*capacity building*) yang dibuktikan dengan memberikan beberapa pelatihan bagi mahasiswa diploma jurusan kesehatan yang nantinya akan ditempatkan pada sektro kesehatan. Selain itu peranan pelaksanaan (*implementation roles*) juga terlihat dimana Australia memperbaiki administrasi rumah sakit dan membuat perencanaan dan penganggaran departemen kesehatan serta menentukan strategi dan aksi kesehatan ditahun 2008.

Pada sektor pendidikan Australia mengalokasikan dananya dengan presentase terbesar yakni 31% dari keseluruhan sektor. Ini disebabkan karena permasalahan yang tinggi di timbulkan karena tsunami dan konflik GAM. Oleh karena itu, Australia melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan pertumbuhan pada sektor pendidikan. Maka terlihat peranan Australia seperti peranan pelaksanaan (*implementation roles*) dengan dibuktikan dari berbagai tindakan yang dilakukan terkait kemampuan menyelesaikan permasalahan (*problem solving*) sesuai isu-isu yang terdapat dilapangan. Dengan menggunakan pendekatan khusus dalam melaksanakan pembangunan di sektor ini Australia mengajak masyarakat setempat untuk ikut serta dalam membangun sekolah mereka. Kegiatan seperti ini dapat

mempererat hubungan antara warga masyarakat. Selain itu Australia menyusun rencana strategis seperti melakukan penguatan ataupun penyederhanaan administrasi dan menyediakan pelayanan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pada bidang pendidikan peranan implementasi lainnya yang terlihat adalah seperti perancangan program khusus bagi para calon Guru dan Kepala Sekolah.

Terdapat pula peranan lainnya yakni peranan fasilitator dengan menyediakan infrastruktur penting di bidang pendidikan. Kegiatan itu dibuktikan dengan merenovasi 84 sekolah, merekonstruksi 13 sekolah, memperbaiki tiga fasilitas administrasi pendidikan pada daerah dampak konflik, serta merenovasi 43 sekolah dasar di daerah-daerah yang terdampak oleh konflik.

Adapun upaya Australia lainnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya dengan memfasilitasi bangunan saja, namun terdapat pula peranan pengembangan kapasitas (*capacity building*). Peranan ini dilakukan dengan membuat program pelatihan bagi para guru dan kepala sekolah, serta pelatihan bagi 1.000 anggota komite sekolah (40% wanita) dan pejabat pendidikan pemerintah di daerah-daerah yang terkena konflik. Selain itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengajaran Australia melakukan pelatihan profesionalisme 1750 guru. Australia juga menyediakan pelatihan dalam aktivitas yang menghasilkan (produktif) bagi 231 anggota staf perempuan di sekolah-sekolah Islam.

Pada sektor infrastruktur dan perumahan tantangan bagi pemerintah Indonesia sangatlah besar. Ini disebabkan karena kerusakan pada sektor ini sebesar 85% atau hampir keseluruhan infrastruktur dan perumahan hancur diterjang gelombang tsunami. Adapun peranan yang dapat dimainkan oleh Australia dalam sektor ini yakni sebagai fasilitator dengan membangun 175 fasilitas umum seperti balai-balai desa serta membangun pelabuhan utama Aceh di Ulee Lheue. Terminal feri pun juga dibangun oleh Australia untuk meningkatkan pertumbuhan penduduk. Terdapat juga peranan Australia dalam membangun lebih dari 1.200 tempat tinggal dan membangun kembali batas-batas lahan lebih dari 88.000 kavling.

Berbagai peranan lainnya yang dimainkan oleh Australia seperti peranan pelaksanaan

(*implementation roles*). Dengan melihat berbagai permasalahan seperti kecurangan pada kegiatan pembangunan fisik infrastruktur maka tim AusAID mensiasati permasalahan tersebut dengan menempatkan tim AusAID di pemerintahan tingkat pusat hingga provinsi. Selain itu membentuk tim untuk memonitor program.

Peranan sebagai konsultan juga terlihat dilakukan oleh Australia ini disebabkan karena isu-isu kualitas bangunan yang kurang baik dari donor lainnya. Maka Australia menaruh perhatian pada pembangunan yang nantinya memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR). Terkait hal itu Australia juga melatih dalam pengembangan kapasitas 2.300 anggota masyarakat dari 204 desa.

Dengan dibangunnya pelabuhan dan terminal feri di Aceh maka dapat menimbulkan pertumbuhan dalam bidang ekonomi di masyarakat Aceh. Hal ini disebabkan karena pelabuhan dan transportasi laut sangat sering digunakan masyarakat untuk mendistribusikan barang dagangan dan transportasi sehingga masyarakat mampu melakukan kegiatan perekonomian kembali dan tentu saja ini akan menciptakan pertumbuhan di Aceh. Ini dibuktikan dengan sekitar 900 warga menggunakan fasilitas ini pada tahun 2005, ini juga menimbulkan munculnya mata pencaharian baru di sekitar pelabuhan.

Tata pemerintahan merupakan sektor keempat yang telah kita ketahui bahwa pemerintahan di Aceh bisa dibidang sangat buruk. Ini karena konflik yang membuat lemahnya pelayanan masyarakat di Aceh. pada sektor ini Australia banyak melakukan peranan seperti Peranan sebagai fasilitator dengan membangun tujuh kantor kecamatan yang berada di Aceh. Selain itu peranan sebagai pengembangan kapasitas (*capacity building*) banyak terlihat pada sektor ini pertama Australia memberikan pelatihan bagi para pegawai yang baru diangkat. Sebanyak 700 pemerintah daerah dilatih untuk memperbaiki kualitas pemerintahan. Australia juga melatih 2.300 orang sebagai pemimpin masyarakat (lebih dari setengahnya perempuan) di 204 desa.

AusAID juga dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah dan tata kelola dan koordinasi. Seperti yang dikatakan oleh Tom

Fox dan Dave prescott (2004) bahwa agensi pembangunan dapat meningkatkan kemampuan atau kapasitas pemerintah. Salah satunya menerapkan model pelayanan satu pintu di 51 pemerintahan. Selain itu dalam meningkatkan koordinasi Australia memfasilitasi kegiatan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melancarkan proses pemilu.

Banyak kegiatan yang mendukung peranan Australia pada sektor mata pencaharian. Kegiatan itu dilatar belakangi oleh permasalahan yang ada seperti yang telah kita ketahui bahwa sumber mata pencaharian di Aceh adalah nelayan dan pertanian. Namun pasca bencana cadangan ikan dilaut, kualitas air tanah dan tanah menjadi sangat buruk. Maka dari itu dapat terlihat peranan Australia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu peranan yang diberikan adalah sebagai fasilitator dengan membangun infrastruktur pendukung dalam mempercepat pertumbuhan di bidang ini Australia merekonstruksi beberapa tempat pembudidayaan utama di Aceh sebagai pusat pelatihan. Selain itu, Australia juga membangun laboratorium sebagai fasilitas budidaya air teknis utama di Aceh.

Fungsi pengembangan kapasitas (*capacity building*) juga terlihat seperti memberikan pelatihan tentang akuakultur, melatih 2.890 klien bisnis diseluruh Aceh dan juga melatih 81 pekerja dibidang pertanian. Peranan tata kelola dan koordinasi juga memberikan peranan penting dalam sektor ini dengan mempertemukan produsen lokal dengan para investor asing, Australia dapat menjadi perantara antara pihak asing dan lokal di Aceh. Peranan ekonomi pun juga dimainkan pada sektor ini dengan melakukan pemerataan ekonomi kepada seluruh masyarakat tak terkecuali mantan kombatan GAM.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Peranan Australia adalah sebagai *fasilitator* yang berfungsi sebagai aktor yang membangun segala infrastruktur dan perumahan. Peranan *governance and co-ordination* yang berfungsi memfasilitasi kegiatan dalam hal koordinasi untuk mencapai tujuan strategi pembangunan dan mengatasi kesenjangan yang ada antara pihak swasta dan publik. Ada pula *leadership roles* yakni seluruh bentuk dari berfungsi untuk mendorong dan

menyusun strategi rencana jangka panjang dan visi pembangunan di Indonesia khususnya Aceh. Terdapat juga *capacity building* atau terkait dengan fungsi pengembangan kapasitas masyarakat dengan memberikan pelatihan terkait *skill* / kemampuan masyarakat, dan juga terdapat *implementation roles* yakni segala bentuk peranan dari *skill* tim kerja Australia yang menonjol dalam mencapai strategi pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Aceh. Terakhir *economic roles* yakni Australia berfungsi sebagai aktor yang menciptakan kegiatan perekonomian dengan membangun asset-aset tertentu.

Dari keseluruhan pembangunan di Aceh dapat disimpulkan bahwa peranan Australia mengutamakan pada pembangunan yang dapat memicu pertumbuhan dibidang perekonomian dan pemerintahan. Dalam memperhitungkan strategi pembangunan di beberapa sektor tersebut Australia memiliki peranan kepemimpinan yang mampu melihat celah kekosongan pada setiap program yang dilakukan oleh donor lainnya. Peranan kepemimpinan dapat didukung dengan adanya kemampuan terkait *skill* AusAID dalam menentukan dan merencanakan arah pembangunan. Dapat disimpulkan pula tindakan dari Australia yang menyeimbangkan pembangunan fisik seperti gedung dan prasarana pendukung dengan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kapasitas.

Adapun kendala yang dihadapi pada proses pembangunan Aceh pasca tsunami yakni pada pendistribusian bantuan, konflik separatisme, banyaknya sumber daya manusia yang tewas dan tindakan korupsi. Namun seluruh tantangan tersebut mampu diatasi oleh pemerintah Australia dengan menggunakan pendekatan-pendekatan melalui isu pendidikan, gender dan pemberdayaan masyarakat, sehingga perdamaian dan kesejahteraan masyarakat Aceh dapat tercipta.

6. DAFTAR PUSTAKA

Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade.(2008). *Australia-Indonesia Partnership for Reconstruction and Development*. Diakses pada 3 Mei 2014 dari http://aid.dfat.gov.au/Publications/Pages/9896_8206_7236_7366_608.aspx

Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (2006). *Indonesia Update Ulasan Akhir Tahun 2006*. Diakses pada 3 Mei 2014 dari http://aid.dfat.gov.au/Publications/Documents/in-do_update_bh.pdf.

Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (2008). *Tinjauan Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (AIPRD) Laporan Akhir Tahun 2008*. Diakses pada 3 Mei 2014 dari http://aid.dfat.gov.au/Publications/Documents/AIPRD_review_report.pdf

BAPPENAS. (2007). *Apakah AusAID*. Dikutip pada 3 Mei 2014 dari [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/6\)%20Profil%20Lembaga%20Donor/4\)%20AUSAID/Apakah%20AusAID.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/6)%20Profil%20Lembaga%20Donor/4)%20AUSAID/Apakah%20AusAID.pdf)

BNPB. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*. Dikutip pada 3 Mei 2014 dari bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/1.pdf

Kawilarang R.A & Dewi S. (2013, September 19). *Australia rombak AusAID, bantuan untuk RI dipangkas*. Vivanews. Dikutip pada 8 Oktober 2014 dari <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/445500-australia-rombak-ausaid--bantuan-untuk-ri-dipangkas->

Ikbar, Y. (2006). *Ekonomi politik internasional* (2). Bandung: Refika Aditama

Kenny S. (2005). *Oxford University Press and Community Development Journal. Reconstruction in Aceh: building whose capacity?*, 206-221

McKeon. (2004). *Menelusuri Penggunaan Dana Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi & Tsunami 2004 di Indonesia*. Dikutip pada 8 Oktober 2014 dari http://siteresources.worldbank.org/indonesia/resources/226271-1176706430507/3681211-1194602678235/4375533-1198637122429/traking.reconstruction.funds.affiler.tsunam_bahasa.pdf

Najhib, R. K. (2014, Maret 04). *Guest lecture: dinamika hubungan RI dan Australia oleh Najhib Riphah Kesoema (dubes RI untuk Australia)*.

Universitas Bakrie. Dikutip pada 8 Oktober 2014 dari <http://www.bakrie.ac.id/index.php/en/2012-12-04-08-37-08/news/383-guest-lecture-dinamika-hubungan-ri-dan-australia-oleh-najhib-riphat-kesoema-dubes-ri-untuk-australia>

Noor, J. (2011). *Metodologi penelitian (skripsi,thesis,disertasi,dan karya ilmiah)* Jakarta: Kencana.

OECD. (2009). *Organising for Local Development: The Role of Local Development Agencies*. Dikutip pada 8 Oktober 2014 dari <http://www.oecd.org/regional/leed/44682618.pdf>

Pemerintah Provinsi Aceh. (2005) *BAB II Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Aceh*. Dikutip pada 8 Oktober 2014 dari http://www1-media.acehprov.go.id/uploads/bab_ii_Gambaran_Umum_Kondisi_Aceh_Final_6012011.pdf

Perwita, A .A. Banyu & Yanyan Mochamad Yani. (2005). *Pengantar ilmu hubungan internasional*. Bandung: Rosda

Richard & Elaine. (2009). *Theory of Development. Contentions, Arguments, Alternatives. Jurnal of Urban and regional analysis*, hal. 105-117 Dikutip pada 8 Oktober 2014 dari http://www.jurareview.ro/2011_1_1/a_2011_1_1_book_review.pdf

Rosman, G. B. & Rallis, S. F. (2003) *Learning in the field : an introduction to qualitative research 2nd edition* California : SAGE.

Sawada, Y. (2011). Economics of official development assistance : views from Japan and East Asia. *The International Economy*, 15, 57-74.

Srivichai, M, Supharatid, S, & Imamura, F. (2007). *Recovery process in Thailand after the 2004 Indian ocean tsunami*.*Journal of Natural Disaster Science*. 29, 3-12.

Sulistianto, B. (2013). *Konsep dan kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana*. Dikutip pada 8 Oktober 2014 dari <http://pusdiklat.bnppb.go.id/home/downloads/materipelatihanRR/2.%20konsep%20kebijakan%20RR%20%20pak%2022apr13.pdf>

Sisira, J., McCawley, P., Nidhiprabha, B., Budi, P., Weerakoon, D. et al. (2005). *The Asian Tsunami*. UK: MPG group.

Tom F. & Dave P. (2004). *Exploring the role of Development Cooperation*

Agencies in Corporate Responsibility. Dikutip pada 8 Oktober 2014 dari http://www.coc-runder-tisch.de/news/news_juni_2005/ExploringRoleDC_CSR.pdf

World Bank. (2008). *Kajian Kemiskinan di Aceh Tahun 2008*. Dikutip pada 8 Oktober 2014 dari http://siteresources.worldbank.org/indonesia/resources/publication/280016-1200376036925/aechpoverty2008_bh.pdf